

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 merupakan dokumen rencana pembangunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala periode tahun 2019 yang penyusunannya berdasarkan pada program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Tujuan penyusunan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 merupakan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peternakan, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/ MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
13. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan pemerinah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang

secara umum akan dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Barito Kuala, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu (tahun-2) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1).

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dengan Capaian RENSTRA SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penetapan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah Pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dengan Capaian RENSTRA SKPD

Proses penyusunan suatu program dan kegiatan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2018-2022 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada pembangunan ketahanan pangan dan perikanan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala terkait dengan urusan Ketahanan Pangan dan Perikanan salah satunya dapat dilihat dari sasaran startegis sebagai berikut :

- **Meningkatnya Kemandirian Pangan**

Pangan merupakan

Hak Azasi Manusia, pangan juga menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dan pangan merupakan pilar ketahanan nasional. Ketahanan pangan merupakan pilar pembangunan sektor lainnya. Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional akan terganggu.

Meningkatnya kemandirian pangan merupakan merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**”. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan “Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan” sebagai indicator kinerja utama.

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro). PPH ketersediaan pangan adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi (FAO-RAPA,1989). Tujuan penyusunan PPH adalah rasionalisasi pola ketersediaan pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan (bagi kualitas hidup penduduk), yang kemudian

digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan pangan penduduk (jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan komposisi/anekaragam pangan).

Keberagaman ketesedian pangan dibutuhkan untuk mengarahkan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia di lingkungan dan di pasaran. Kondisi inilah yang mendasari dibutuhkannya hasil analisis Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan. PPH ketersediaan disusun untuk menyeimbangkan antara keberagaman pangan yang tersedia yang kemudian di konsumsi oleh masyarakat. Dalam penyusunannya, Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan selalu menyertai Neraca Bahan Makanan (NBM).

Pada tahun anggaran 2019 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya meningkatkan kemandirian pangan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Kegiatan tersebut merupakan lanjutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- c. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah

- d. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- e. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok

- **Meningkatnya Diversifikasi Pangan**

Meningkatnya Diversifikasi pangan merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang dikonsumsi sehingga tidak terfokus pada satu jenis saja. Konsep diversifikasi hanya terbatas pangan pokok, sehingga diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non beras (Pakpahan dan Suhartini, 1989). Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan (Suhardjo, 1998).

Peningkatan diversifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang. Diversifikasi pangan yang dilakukan masyarakat kawasan ASEAN umumnya, dan Indonesia khususnya yaitu berupa nasi, karena mayoritas wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah penghasil beras. Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program tersebut dengan menjelaskan definisi diversifikasi pangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan demi mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar tidak melebihi produksinya.

Meningkatnya diversifikasi pangan merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatkan**

Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian ". Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menetapkan "Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" sebagai indikator kinerja utama. Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai:

1. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan.
2. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah.
3. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Pada tahun anggaran 2019 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala akan melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi kelompok wanita untuk menerapkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). Kegiatan tersebut merupakan lanjutan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun kegiatan dimaksud yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah :

- a. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
- b. Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk. Kabupaten dan Propinsi
- c. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

d. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

• **Meningkatnya Produksi Perikanan**

Meningkatnya Produksi Perikanan merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian Misi 2 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**” dengan Indikator Kinerja Utama “Jumlah Produksi Perikanan” yang dituangkan dalam 2 program utama yaitu :

(1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 2 indikator program :

a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang didukung kegiatan :

- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
- Regenerasi Induk Ikan Unggul

b. Persentase kelompok budidaya penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan, didukung kegiatan :

- Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar

(2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 2 indikator program :

a. Jumlah produksi perikanan tangkap yang didukung oleh kegiatan :

- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

b. Persentase kelompok penangkapan penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan yang didukung kegiatan :

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tercapainya sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan juga didukung oleh 2 program pendukung lainnya, yaitu :

- (1) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan indikator program :
 - a. Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan (kasus) yang didukung oleh kegiatan :
 - Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- (2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator program :
 - b. Jumlah hasil olahan perikanan yang didukung oleh kegiatan :
 - Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
 - Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan Perikanan

Pada tahun anggaran 2018 melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah dilaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dalam meningkatkan produksi perikanan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah :

- (1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan 2 indikator program :
 - a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya yang didukung kegiatan :
 - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
 - Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
 - Pengembangan Bibit Ikan Unggul

- b. Persentase kelompok budidaya penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan, didukung kegiatan :
- Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar
- (2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan 2 indikator program :
- a. Jumlah produksi perikanan tangkap yang didukung oleh kegiatan :
- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
- b. Persentase kelompok penangkapan penerima sarpras yang memanfaatkan sesuai ketentuan yang didukung kegiatan :
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
- Tercapainya sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan juga didukung oleh 2 program pendukung lainnya, yaitu :
- (3) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan indikator program :
- a. Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan (kasus) yang didukung oleh kegiatan :
- Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
- (4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan indikator program :
- b. Jumlah hasil olahan perikanan yang didukung oleh kegiatan :
- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan setelah semester I tahun anggaran berjalan, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja periode 30 Juni 2018, pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 30 JUNI 2018

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					
		INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN				BOBOT (%)	
		HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	(%)	PAGU (Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
01	Belanja Pegawai										
	01	Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan lainnya	630 OB	3.649.587.111	270 OB	42,86	1.149.292.429	31,49	48,26	
	02	Tambahan Penghasilan PNS	Terlaksananya pembayaran berdasarkan beban kerja	540 OB	679.928.563	225 OB	41,67	241.434.375	35,51	8,99	
02	Penerimaan / Pendapatan	Hasil retribusi daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah								
		- Sewa KJA		296 Buah	29.600.000	296 buah	100,00	29.600.000	100,00	0,39	
		- Sewa Rumah Dinas		60 Buah	3.000.000	0	0	0	0	0,04	
		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah									
		- Penjualan benih ikan		300.000 Ekor	40.500.000	115.500 ekor	38,5	16.350.000	40,37	0,54	
		- Penjualan larva		10.000 Ekor	500.000	0	0	0	0	0,01	
	JUMLAH A			1170	4.329.515.674	495	42,31	1.390.726.904	55,67	57,25	

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

B. BELANJA LANGSUNG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN					
		INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
			HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	(%)	PAGU (Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya administrasi perkantoran									
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	1.020	lbr	47.910.000	1.077	lbr	105,59	21.286.500	44,43
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah langganan listrik, PDAM, telepon	12	Bln	58.888.500	6	Bln	50,00	34.139.998	57,97
03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah pajak STNK dan KIR kendaraan yang dibayar	71	unit	20.190.000	19	unit	26,76	2.299.500	11,39
04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	396	buah	29.107.500	92	buah	23,23	12.566.500	43,17
05	Penyediaan alat tulis kantor	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	1.461	buah	39.286.400	866	buah	59,27	23.454.350	59,70
06	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah jenis cetak berkas kantor	43.132	lembar	21.547.500	14.920	lembar	34,59	7.670.000	35,60
07	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	155	bh	5.500.000	78	buah	50,32	2.250.000	40,91
08	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak	108	eks	8.100.000	35	eks	32,41	3.880.000	47,90
09	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat	13.886	porsi	57.769.000	2.857	porsi	20,57	22.232.000	38,48
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95	OK	144.570.000	35	OK	36,84	92.689.203	64,11

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	125	OH	61.173.800	46	OH	36,80	21.036.900	34,39
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	24	org/bln	25.870.000	12	org/bln	50,00	12.670.000	48,98
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2, dan speed boat yang siap operasional	588	Unit	103.300.000	294	Unit/bln	50,00	51.015.000	49,39
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RKBU	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	47	unit	37.149.000	23	unit	48,94	17.336.000	46,67
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR										
15	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase aparatur yang mengikuti diklat / bimtek	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkatkan kompetensinya	4	OK	44.000.000	1	OK	25,00	11.343.000	25,78
04	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI										
16	Penyelenggaraan pameran dan investasi/promosi daerah	Jumlah hasil pembangunan yang dipromosikan	Jumlah pameran yang mempromosikan hasil pembangunan daerah	1	kali	15.000.000	1	kali	100,00	12.800.000	85,33
05	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)										
01	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Score Pola Pangan Harapan	Laporan analisis pola konsumsi pangan	1	laporan	33.774.000	0	laporan	0,00	10.673.000	31,60
02	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Laporan kondisi ketahanan pangan	2	laporan	44.111.500	-	laporan	0,00	22.859.000	51,82

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

03	Pameran ketahanan pangan dan lomba cipta menu pangan tk.Kabupaten,Provinsi,dan Nasional	Score Pola Pangan Harapan	Jumlah pelaksanaan menu B2SA	1	kali	103.282.500	-	kali	0,00	570.000	0,55
04	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Score Pola Pangan Harapan	Laporan hasil uji lab. Keamanan pangan segar	24	sampel	24.204.000	-	sampel	0,00	5.100.000	21,07
05	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan lumbung pangan	42	kelompok	8.720.000	42	kelompok	100,00	7.530.000	86,35
06	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Jumlah desa mandiri pangan yang mendapatkan pendampingan	23	desa	12.640.000	-	desa	0,00	4.880.000	38,61
07	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah	Jumlah cadangan pangan pemerintah untuk situasi rawan pangan	15.500	ton GKG	135.810.000	-	ton GKG	0,00	4.880.000	3,59
08	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	Jumlah cadangan pangan masyarakat	Laporan analisis harga pangan pokok	2	laporan	28.120.000	1	laporan	50,00	12.604.000	44,82
09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Score Pola Pangan Harapan	Jumlah kelompok wanita yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan pekarangan	5	KWT	67.086.000	0	KWT	0,00	10.752.000	16,03
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
06	PROGRAM PENINGK. KESADARAN & PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SD LAUT										
01	Penyuluhan hukum dlm pendayagunaan sumberdaya laut	Jumlah produksi perikanan tangkap	Persentase kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti sampai proses P21	100	Persen	64.022.900	-	Persen	-	13.996.225	21,86
07	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										
01	Pengembangan bibit ikan unggul	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi benih ikan unggul	315.000	ekor	139.842.100	115.500	ekor	36,67	52.103.490	37,26
02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah peserta pelatihan pembudidaya ikan	60	orang	36.900.000	60	orang	100,00	16.391.000	44,42
03	Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah kelompok penerima sarana prasarana budidaya	4	klpk	220.640.500	1	klpk	25,00	73.537.000	33,33

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

	04	Pengembangan bibit ikan unggul (DAK)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi benih ikan unggul	315.000	ekor	788.000.000	115.500	ekor	36,67	0	0,00
	05	Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar (DAK)	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah kelompok penerima sarana prasarana budidaya	7	klpk	350.000.000	0	klpk	0,00	0	0,00
	06	Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah jenis pakan yang disediakan	7.277	kg	144.845.000	0	kg	0	28.419.700	19,62
	1	2	3	4	5		6	7		8	9	
08		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										
	01	Pendampingan pada Kelompok Nelayan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah nelayan/kelompok yang dibina	180	orang	87.785.700	45	orang	25,00	18.481.499	21,05
	02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah kelompok penerima sarana dan prasarana penangkapan	3	klpk	127.244.000	0	klpk	0	11.662.600	9,17
	1	2	3	4	5		6	7		8	9	
09		PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										
	01	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah hasil olahan perikanan	Jumlah pengolah yang mengalami peningkatan pengetahuan diverifikasi olahan ikan	60	orang	96.558.900	30	orang	50	36.271.924	37,56
		JUMLAH B			714.356		3.232.948.800	251.511		35,21	679.380.389	21,01
RESUME												
		JUMLAH A			1.170		4.329.515.674	495		42,31	1.390.726.804	55,67
		JUMLAH B			714.356		3.232.948.800	251.511		35,21	679.380.389	21,01
		TOTAL ANGGARAN			715.526		7.562.464.474	252.006		38,76	2.070.107.193	38,34

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan dan perikanan dapat dilihat dengan sinergi antara pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi dan pembangunan daerah kabupaten/kota, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.

Melihat kondisi tersebut di atas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala selaku Dinas Teknis mencoba untuk mensinergikan pembangunan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

1. Mendukung pembangunan yang sinergis antara pusat, provinsi dan daerah.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keberlangsungan ketersediaan pangan pemerintah dan masyarakat dan peningkatan produksi seluruh komoditi perikanan .
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk kurun waktu RPJMD 2017- 2022 baru dapat diukur untuk tahun 2018 periode Juni 2018 yang target dan pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 2. CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN PERIODE 30 JUNI 2018

CAPAIAN KINERJA				
NO.	IKU SKPD	SATUAN	CAPAIAN BULAN JUNI	%
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Score 86)	Score	0	0
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Score 84,1)	Score	0	0
3	Jumlah Produksi Perikanan (19.612 Ton)	Ton	11.070,29	56,45

CAPAIAN SUBSTANTIF				
NO.	SUBSTANTIF	INDIKATIF	CAPAIAN BULAN JUNI	%
1	Pendapatan	Sewa KJA, Sewa rumah dinas, penjualan benih ikan dan penjualan larva ikan sebesar Rp. 73.600.000,-	Rp. 19.100.000,-	25,95
2	Bibit Ikan	Produksi larva dengan target 315.500 ekor	253.500 ekor	80,35
3	Produksi perikanan	Budidaya dengan target 10.264 ton	5098,53	49,67
		Penangkapan dengan target 9348 ton	5971,36	63,88
		Olahan dengan target 8,21 ton	2,9 ton	35,32
4	Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Pengadaan beras sebanyak 15,5 ton	0	0
5	Situasi konsumsi pangan	PPH konsumsi dengan target nilai 84,1	0	0
6	Keamanan pangan	Jumlah komoditas pangan yang diuji keamanan pangannya dengan target 10 sampel	0	0
7	Ketersediaan Pangan	PPH Ketersediaan dengan target score 86	0	0

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Barito Kuala masih rendah karena pola makan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan masih didominasi bahan makan berupa beras
- b) Penanganan distribusi pangan melalui program penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dalam rangka stabilitas harga belum optimal dan memadai, karena penempatan PLDPM belum merata
- c) Pengawasan keamanan pangan belum optimal, terutama untuk komoditi pangan segar berupa sayuran dan buah buahan
- d) Pencapaian penanganan kerawanan pangan masih belum optimal akibat kurangnya sumberdaya manusia
- e) Penguatan kelembagaan lumbung pangan dan perluasan desa mandiri pangan masih belum maksimal
- f) Kualitas SDM masih rendah, sehingga teknologi usaha perikanan belum bisa dikuasai sepenuhnya
- g) Lemahnya permodalan merupakan masalah klasik belum bisa terpecahkan secara tuntas. Disisi lain lembaga perkreditan/perbankan kurang berminat menyalurkan kredit, karena usaha perikanan dinilai berisiko tinggi
- h) Tumpang tindih pemanfaatan lahan yang terus terjadi, sebagai akibat dari belum optimalnya penyusunan tata ruang dan pengendaliannya.
- i) Degradasi sumberdaya perikanan karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan maupun dampak dari

- kegiatan lain, misalnya adanya perkebunan sawit, stockfile batu bara.
- j) Mutu produk olahan perikanan yang memiliki mutu rendah sehingga bernilai jual rendah.
 - k) Perubahan musim yang tidak menentu akibat dari global warming effect (pemanasan global) yang sangat merugikan bagi pembudidaya dan nelayan.
 - l) Mulai dilaksanakannya AFTA sebagai wujud diawalinya liberalisasi investasi dan perdagangan global (APEC 2010 dan WTO 2020). Sebagai indikasi, saat ini makin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan yang semakin ketat.

Dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat dirumuskan sbb :

- Belum optimalnya stok cadangan pangan dan distribusi pangan serta minimnya ketersediaan produk pangan
- Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat
- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya sektor perikanan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dalam usaha untuk meningkatkan kinerjanya merencanakan 9 (sembilan) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan 2 (dua) Kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran yang diperlukan pada rencana awal oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 2.126.097.800,- (Dua miliar seratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah). Setelah ditetapkan pagu untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 3.232.948.800,- (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga rencana kerja tahun 2018 mengalami perubahan yang terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan karena ada penambahan kegiatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rancangan Awal Tahun 2018		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
Non Urusan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	Jumlah materai untuk administrasi dinas	1.020 lembar	37.350.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	1.020 buah	37.350.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Waktu pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	58.888.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan listrik, PDAM, telepon	12 bulan	58.888.500

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	71 buah	21.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pajak STNK dan KIR kendaraan yang dibayar	71 buah	21.050.000
8	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat kebersihan kantor yang disediakan	36 jenis	18.127.500	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	36 jenis	18.127.500
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1.767 buah	41.999.400	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	29 jenis	41.999.400
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	44.544 lembar	23.551.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak berkas kantor	3 jenis	23.551.000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah Komponen Listrik yang Disediakan	209 buah	5.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	9 jenis	5.500.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	96 eksemplar	8.280.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan surat kabar harian/media cetak	108 eksemplar	8.280.000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	14.586 porsi	63.376.500	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu dan rapat	13.886 Porsi	63.376.500
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 OH/OK	176.860.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	176.860.000
20	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Kabupaten	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	192 OH	35.301.800	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	1 Laporan	35.301.800
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	SKPD	Waktu pelaksanaan jaga malam kantor	365 hari	21.900.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	1 Unit	21.900.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	71 buah	111.660.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4, roda 2 yang siap operasional	49 Buah	111.660.000
28	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah aset dinas yang dipelihara	96 buah	34.308.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	47 Buah	34.308.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Sosialisasi	4 OK	44.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti diklat dan meningkat kompetensinya	4 Orang	44.000.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
10	Penyelenggaraan Pameran Investasi / Promosi Daerah	Kabupaten, SKPD, Marabahan	Jumlah Pelaksanaan Pameran	1 Kali	15.000.000	Penyelenggaraan Pameran Investasi / Promosi Daerah	Jumlah pameran yang mempromosikan hasil pembangunan daerah	1 Kali	15.000.000
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)								

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Kabupaten	Laporan analisis pola konsumsi pangan	1 laporan	38.800.000	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Laporan analisis pola konsumsi pangan	1 laporan	38.800.000
5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Kabupaten	Laporan kondisi ketahanan pangan daerah	2 laporan	44.500.000	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Laporan kondisi ketahanan pangan daerah	2 laporan	44.500.000
9	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kabupaten	Jumlah kelompok wanita yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan pekarangan	2 KWT	70.030.000	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok wanita yang mendapatkan pembinaan pemanfaatan pekarangan	2 KWT	70.030.000
11	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Kabupaten	Laporan analisis harga pangan pokok	1 laporan	30.429.000	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Laporan analisis harga pangan pokok	1 laporan	30.429.000
13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Kabupaten	Jumlah cadangan pangan pemerintah untuk situasi rawan pangan	16 ton	135.920.000	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah untuk situasi rawan pangan	16 ton	135.920.000
14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Kabupaten	Jumlah desa mandiri pangan yang mendapatkan pendampingan	5 desa	10.000.000	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang mendapatkan pendampingan	5 desa	10.000.000

18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Kabupaten	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan lumbung pangan	42 kelompok	8.705.000	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan lumbung pangan	42 kelompok	8.705.000
22	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kabupaten	Laporan hasil uji laboratorium keamanan pangan segar	1 laporan	25.500.000	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Laporan hasil uji laboratorium keamanan pangan segar	1 laporan	25.500.000
32	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten dan Propinsi	SKPD	Jumlah pelaksanaan lomba menu B2SA	1 kali	63.740.000	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Jumlah pelaksanaan lomba menu B2SA	1 kali	63.740.000
Pilihan									
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut								
	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Kabupaten	Jumlah pemberkasan kasus illegal fishing	3 Kasus	75.000.000	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Jumlah pemberkasan kasus illegal fishing	3 Kasus	75.000.000
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
	Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan	SKPD	Jumlah jenis pakan yang disediakan	3 Jenis	144.845.000	Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan	Jumlah jenis pakan yang disediakan	3 Jenis	144.845.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	SKPD	Jumlah produksi benih ikan unggul	315.000 ekor	136.206.100	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah produksi benih ikan unggul	315.000 ekor	136.206.100
2	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)	SKPD	-	-	-	Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)	Jumlah produksi benih ikan unggul	315.000 ekor	788.000.000
3	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Kabupaten	Jumlah pelatihan budidaya ikan lokal	60 orang	65.535.000	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah pelatihan budidaya ikan lokal	60 orang	65.535.000
4	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar	Kabupaten	Kelompok penerima sarana prasarana budidaya	5 kelompok	228.735.000	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar	Kelompok penerima sarana prasarana budidaya	5 kelompok	228.735.000
5	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)	Kabupaten	-	-	-	Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)	Jumlah kelompok penerima sarpras budidaya	7 kelompok	350.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan	3 jenis	131.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan	3 jenis	131.000.000

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2019

2	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kabupaten	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perikanan	180 orang	100.000.000	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perikanan	180 orang	100.000.000
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								
	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Kabupaten	Jumlah peserta demo pengolahan ikan	60 orang	100.000.000	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah peserta demo pengolahan ikan	60 orang	100.000.000
		TOTAL			2.126.097.800				3.232.948.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018-2022.

Rencana Kerja (Renja) DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 - 2022. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 3 indikator kinerja utama, yang menempatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, dan Jumlah Produksi Perikanan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Kabupaten Barito Kuala dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melalui/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun program dan kegiatan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemamkmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Tahun 2018-2022 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan didalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2017 - 2022, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan Dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dihasilkan dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

3.1.1 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Pertanian

Tabel 4. Hasil Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Kerusakan lingkungan dan dampak perubahan iklim.	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan.	Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global	Revitalisasi lingkungan dan penerapan teknologi ramah lingkungan
2.	Keterbatasan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air	Peningkatan diversifikasi pangan masyarakat.	Kurangnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air	Revitalisasi infrastruktur pertanian
3.	Kecilnya status dan luas	Peningkatan nilai tambah, daya saing	Status dan	Tata ruang

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	penggunaan lahan serta tekanan degradasi dan alih fungsi lahan	dan ekspor.	luas lahan kepemilikan lahan petani sangat terbatas	lahan pertanian
4.	Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi.	Peningkatan kesejahteraan petani (Ketersediaan pangan)	Kondisi iklim yang tidak menentu mempengaruhi proses produksi, ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan	Tersedianya potensi sumber daya alam dalam rangka pengembangan ketersediaan pangan
5.	Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik.	Peningkatan Konsumsi pangan lokal	Masih kurangnya pengetahuan, kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Berkembangnya industri dan teknologi pengolahan pangan serta potensi masyarakat yang telah mampu memproduksi, mengolah dan mengkonsumsi pangan lokal
6.	Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Peningkatan kesejahteraan petani (Distribusi pangan/stabilitas harga)	Terjadinya gagal panen akibat dari gangguan musim, bencana alam, serangan hama penyakit dan lainnya yang dapat	Adanya standarisasi harga pangan strategis bagi para pelaku distribusi pangan dan adanya kerja sama antar lembaga

No	Isu Strategis K/L	Program Prioritas K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			mengakibatkan menurunnya produksi pangan	pemasaran dalam rangka pengendalian harga pangan

3.1.2 Telaahan Terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

VISI KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”

MISI untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 36 dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan

2. Keberlanjutan (sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (Sovereignty), yakni

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (sustainability), yakni

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (Prosperity), yakni

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Arah Kebijakan dan strategi KKP disusun dalam misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pokok

- a. Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi :

- Memberantas IUU Fishing
 - Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi
 - Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan
- b. Membangun prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing dan berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi :
- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut dan pesisir
 - Mengelola sumberdaya ikan di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia (WPPNRI)
 - Mengendalikan sumberdaya perikanan tangkap
 - Mengelola pemanfaatan perairan umum daratan (PUD)
 - Membangun kemandirian dalam budidaya perikanan
 - Meningkatkan sistem logistik hasil perikanan
 - Meningkatkan mutu, diversifikasi dan akses pasar produk kelautan dan perikanan
 - Merehabilitasi ekosistem dan perlindungan lingkungan laut
 - Membangun kemandirian pulau-pulau kecil
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
- Memberi perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam
 - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
 - Meningkatkan usaha dan investasi kelautan dan perikanan

- Meningkatkan kompetensi masyarakat KP melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
- Mengembangkan inovasi IPTEK bidang kelautan dan perikanan

2. Kebijakan Lintas Bidang

- a. Pengarusutamaan gender dibidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan KP
- b. Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi mempercepat pengeurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah
- c. Adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan dengan strategi
 - Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Peningkatan ketahanan masyarakat KP terhadap perubahan iklim
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik, strategi dan langkah yang akan ditempuh adalah
 - Membangun budaya kerja yang profesional
 - Meningkatkan kualitas pengawasan internal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan memiliki dan berperan dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala yaitu : ***Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera***

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

Sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih serta memperhatikan masalah, tantangan, potensi, dan peluang yang tersedia, maka tujuan pembangunan ketahanan pangan dan Perikanan dirumuskan sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Tujuan Pembangunan Sektor Pangan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah :

1. Meningkatkan stok cadangan pangan dan kemampuan membangun sistem distribusi pangan serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup
2. Meningkatkan diversifikasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk pemenuhan pangan masyarakat
3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan

3.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kemandirian pangan

dengan indikator sasaran strategis : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

2. Meningkatnya diversifikasi pangan

dengan indikator sasaran strategis : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

3. Meningkatnya Produksi Perikanan

dengan indikator sasaran strategis : Jumlah Produksi Perikanan

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan stok cadangan pangan dan kemampuan membangun sistem distribusi pangan serta meningkatkan kemampuan membangun ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu, dan keragaman yang cukup		Persentase peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (%)	1,18	1,16	1,15	1,14	1,12
		Meningkatnya kemandirian pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86	87	88	89	90

2.	Meningkatkan diversifikasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk pemenuhan pangan masyarakat		Persentase peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (%)	1	1	1	1	1
		Meningkatnya diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,1	84,9	85,8	86,7	87,5
3.	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan		Persentase peningkatan produksi perikanan (%)	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	19.612	19.716	19.822	19.929	20.036

3.3. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 dan berdasarkan Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala periode tahun 2017 – 2022 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan.

Program merupakan instrumen kebijakan yang meliputi serangkaian kegiatan untuk merealisasikan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi program.

Pada dasarnya semua program yang diimplementasikan dicirikan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a) Berbasis masyarakat
- b) Berwawasan lingkungan
- c) Berorientasi pasar
- d) Berkesesuaian dengan lingkungan spesifik domestik
- e) Bersinergi antara program sektoral dan regional
- f) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ada 5 (lima) program yang akan dilaksanakan dalam rencana strategis Pembangunan Urusan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala, yaitu :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kabupaten Barito Kuala melalui :

1. Ketersediaan pangan dan pengelolaan cadangan pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan dan berkesinambungan

2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan
3. Lancarnya distribusi, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan untuk tercapainya indikator kinerja yang ditargetkan, yaitu :

- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
- Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Program (Outcome)
Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Lumbung Pangan Yang Mandiri	Persen	10	20	30	40	50
2	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	34,246	42,246	53,246	64,246	75,246
3	Koefisiensi Variasi Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	10	9,8	9,6	9,4	9,2
4	Penurunan Konsumsi Beras	Persen	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
5	Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	Persen	80	80,5	81	81,5	82

Sumber : Kepala Bidang Ketahanan Pangan

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini menangani semua kegiatan yang berkaitan dengan budidaya perikanan baik dari pembesaran, pembenihan dan sarana dan prasarana penunjang budidaya dan pembenihan, yang mengarah pada Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB). Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk mencapai peningkatan produksi perikanan melalui usaha budidaya yang dilaksanakan masyarakat kabupaten Barito Kuala. Program ini dalam pencapaian indicator kinerjanya didukung dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

- Pengembangan Bibit Ikan Unggul

- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
- Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul
- Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Air Tawar
- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Melalui program ini, diharapkan budidaya perikanan di Kabupaten Barito Kuala akan berkembang sesuai dengan potensi yang telah dimiliki. Pembudidaya skala kecil dan menengah merupakan target utama. Peningkatan produktivitas yang selanjutnya meningkatkan produksi dan pendapatan adalah hal pokok yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja (outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Indikator Kinerja Program (Outcome) Pengembangan Budidaya Perikanan

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.264	10.366	10.470	10.575	10.680
2	Persentase Kelompok Budidaya Penerima Sarpras Yang Memanfaatkan Sesuai Dengan Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Dalam rangka mewujudkan usaha budidaya dengan menerapkan sistem usaha berdaya saing dan berkelanjutan serta berbasis pedesaan, maka Balai Benih Ikan Lokal Sungai Kambat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kaupaten Barito Kuala berperan sebagai motor penggerak dalam melaksanakan program budidaya ikan khususnya budidaya ikan air tawar.

Tujuan dan tugas pokok dari Balai Benih Ikan Lokal Sungai Kambat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan dan menyalurkan benih ikan yang bermutu.
2. Menerapkan dan menyebarluaskan teknologi perbenihan kepada UPR dan pembudidaya.

Indikator hasil (outcome) yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Indikator Hasil (Outcome) Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul

No	INDIKATOR	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	JumlahProduksi Benih Ikan Unggul Yang Tersedia Untuk Masyarakat	Ekor	315.500	330.940	346.600	366.500	365.540
2	Jumlah Kelompok UPR Yang Dibina Sehingga Meningkatkan Produksi Benihnya	Kelompok	3	3	3	3	3

3	Jumlah Petugas Teknis Perbenihan Yang Meningkatkan Kemampuannya	Orang	6	6	6	6	6
---	---	-------	---	---	---	---	---

Sumber : Kepala UPTD Balai Benih Ikan Sei. Kambat

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dititikberatkan pada upaya penangkapan yang terkendali di perairan umum dan sebagian perairan laut, karena kewenangan kelautan di kabupaten dibatasi oleh UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peningkatan produktifitas dan produksi merupakan indikator kinerja yang ingin dicapai melalui upaya modernisasi teknik penangkapan, menambah sarana penangkapan, penerapan IPTEK, penggunaan alat bantu, peningkatan kemampuan usaha dan lain-lain.

Indikator Kinerja (Outcome) yang ingin dicapai melalui program ini adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9. Indikator Kinerja Program (outcome) Pengembangan Perikanan Tangkap

No	INDIKATOR	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.348	9.350	9.352	9.354	9.356
2.	Persentase	%	100	100	100	100	100

	Kelompok Penangkapan Penerima Sarpras Yang Memanfaatkan Sesuai Ketentuan						
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

4. Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program ini merupakan program pendukung dalam pencapaian produksi perikanan tangkap. Dalam program ini memfasilitasi penanganan kasus illegal fishing yang merupakan instrumen kebijakan dalam pelestarian Bidang Perikanan bekerjasama dengan PPNS dan pihak kepolisian. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah :

1. Memberikan dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan lainnya;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati perairan;
3. Meningkatkan produktivitas usaha penangkapan ikan melalui penggunaan bahan dan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
4. Mengendalikan kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan;

5. Menjaga sumberdaya perikanan dan keanekaragaman hayati perairan dari kepunahan sebagai akibat dari kegiatan eksploitasi sumberdaya perikanan yang tidak bertanggungjawab.
6. Menjaga kelestarian sumberdaya perairan khususnya dibidang perikanan.

Melalui program ini diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, serta penegakan hukum menurut Perundang-undangan di Bidang Perikanan.

Tabel 10. Indikator Kinerja Program (outcome)
Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut

No	INDIKATOR	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan yang ditindaklanjuti	Kasus	3	3	3	3	3

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Komoditas produk perikanan pada saat ini sedang mengalami perluasan dan pengembangan di pasar domestik dengan memanfaatkan jaringan modern yang diharapkan dapat mendorong pemasaran produk-produk perikanan hingga ke pemasaran dunia.

Dalam system agribisnis perikanan, dimana meliputi kegiatan mulai pengadaan sarana produksi, produksi, pengolahan pasca

panen (agroindustry), pemasaran dan kelembagaan merupakan rangkaian kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Khusus kegiatan pemasaran, disaat produk sudah dihasilkan baik dalam kegiatan sarana produksi, produksi dan agroindustry, maka kegiatan pemasaran sangatlah penting.

Merujuk pada norma atau kaidah pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan adalah proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pengambilan keputusan, alokasi sumberdaya, formulasi dan implementasi disertai dengan pengamanan seperlunya terhadap peraturan yang berlaku demi menjaga kelangsungan produksi.

Untuk membina dan mengkoordinir pengembangan pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk mencapai peningkatan produksi olahan melalui usaha pengolahan yang dilaksanakan masyarakat kabupaten Barito Kuala. Program ini dalam pencapaian indicator kinerjanya didukung dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
- Pendampingan pada kelompok pengolahan perikanan

Tabel 11. Indikator Kinerja Program (outcome)
Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

No	INDIKATOR	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah hasil olahan perikanan	Ton	8,21	8,62	9,05	9,51	9,98

Sumber : Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Tabel 12.
Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
		- Pengembangan Lumbung Pangan Desa
		- Pengembangan Desa Mandiri Pangan
		- Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
		- Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
		- Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
		- Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
		- Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
		- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2	Pengembangan Budidaya Perikanan	- Pengembangan Bibit Ikan Unggul
		- Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Air Tawar
		- Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
		- Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan
		- Pengadaan Calon Induk Ikan

		Unggul
3	Pengembangan Perikanan Tangkap	- Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
		- Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
4	Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	- Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
5	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan
		- Pendampingan pada kelompok pengolahan perikanan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan bersumber dari APBD (APBD I dan APBD II) dan APBN (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus). Dana APBN dekonsentrasi dikelola oleh SKPD Propinsi, Tugas Pembantuan dikelola oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus dikelola oleh SKPD kabupaten/kota.

Adapun rencana kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 13
RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)				
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
0	Non Urusan											
0	0			-								
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
0	0	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	SKPD Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	1.020 buah surat	37.350.000	Pendapatan Daerah	Pembelian materai dan honor 4 orang petugas administrasi umpeg dan program keuangan	1.020 buah surat	37.350.000
0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah langganan listrik, PDAM, telepon	12 bulan	75.600.000	Pendapatan Daerah	Air, listrik dan telepon	12 bulan	85.000.000

PENDAHULUAN

0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Pajak STNK dan KIR mobil/kendaraan yang dibayar	77 buah	23.800.000	Pendapatan Daerah	Pembayaran pajak STNK/BPKB/Plat kendaraan (roda 2, 3 dan 4)	77 buah	23.800.000
0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	20 Jenis	18.127.500	Pendapatan Daerah	Alat kebersihan, upah 1 orang kebersihan kantor dan jasa tukang tebas lingkungan kantor	20 Jenis	18.127.500
0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	SKPD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	36 jenis	49.967.775	Pendapatan Daerah	Penyediaan ATK Dinas dan kegiatan teknis	36 jenis	49.967.775
0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah jenis cetakan berkas kantor	5 jenis	23.551.000	Pendapatan Daerah	Cetak kwitansi, kop amplop dinas kecil/sedang/besar, pengendali surat keluar/masuk, kop map dinas dan fotocopy	5 jenis	23.551.000
0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah jenis pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor	10 Jenis	5.500.000	Pendapatan Daerah	Pembelian peralatan listrik	10 Jenis	5.500.000

PENDAHULUAN

0	0	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	SKPD	Jumlah Penyediaan Surat Kabar Harian/media cetak	108 Eksemplar	8.280.000	Pendapatan Daerah	Penyediaan koran nasional 8 eksemplar	108 Eksemplar	8.280.000
0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD	Jumlah porsi makan dan minum untuk harian pegawai, tamu, rapat	13.886 porsi	71.192.000	Pendapatan Daerah	Makan minum harian pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu	13.886 porsi	71.192.000
0	0	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	SKPD	Jumlah Laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120 Laporan	295.000.000	Pendapatan Daerah		120 Laporan	310.000.000
0	0	1	20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi tertentu dengan kecamatan	192 Laporan	62.250.000	Pendapatan Daerah	Perjalanan Musrenbang, Inventarisasi Aset, Statistik (onedata), Monitoring	192 Laporan	68.500.000
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
0	0	2		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan operasional	1 Buah	300.000.000	Pendapatan Daerah	Kendaraan Operasional Roda 4	0 Buah	0

PENDAHULUAN

0	0	2		Pembangunan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah luasan gedung kantor yang dibangun	130 m2	200.000.000	Pendapatan Daerah	1 paket gudang luas 45 m2 1 paket aula rapat luas 55 m2 1 paket ruang kepala dinas luas 30 m2	450 m2	200.000.000
0	0	2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor	SKPD	Jumlah luasan taman dilingkungan kantor yang dipelihara dan kondisi representatif	922 m2	200.000.000	Pendapatan Daerah	Urug dan batako halaman kantor luas 646m2 Urug taman luas 276m2	0 m2	0
0	0	2		Pengadaan Mebeleur	SKPD	Jumlah pembelian mebeleur kantor	7 buah/set	21.000.000	Pendapatan Daerah	Pengadaan rak lemari besi	2 buah/set	6.000.000
0	0	2	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit	30.000.000	Pendapatan Daerah	Harga berdasarkan jumlah dan ukuran jendela (pengadaan gordena dan vitrage)	0 unit	0
0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah pembelian peralatan Gedung Kantor	6 buah/unit	66.000.000	Pendapatan Daerah	Pengadaan Laptop 2 buah, Printer 2 buah, AC 3 buah, Faximille 1 buah, Komputer PC 2 buah.	5 buah/unit	32.000.000

PENDAHULUAN

0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD	Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	1 unit/set/m2	21.900.000	Pendapatan Daerah	Upah 2 orang jaga malam kantor x 365 hari	1 unit/set/m2	21.900.000
0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas roda 4, roda 2 dan speed boat yang siap operasional	77 buah	292.860.000	Pendapatan Daerah		77 buah	292.860.000
0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dan siap operasional	75 buah	69.210.000	Pendapatan Daerah	Sesuai dengan jumlah aset yang terpelihara	75 buah	76.000.000
0	0	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
0	0	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	SKPD	Jumlah PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat dan meningkat Kompetensinya	10 Orang	132.000.000	Pendapatan Daerah	Bimtek Perencanaan, Keuangan, Aset, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Umum Kepegawaian	10 Orang	145.000.000

PENDAHULUAN

0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
0	0	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen (SAKIP) SKPD yang benar dan tepat waktu	5 Dokumen	20.110.000	Pendapatan Daerah	SAKIP (Renstra, Renja, IKU, PK, LKIP)	5 Dokumen	22.121.000	
0	0	6	4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang benar dan tepat waktu	2 Laporan	20.110.000	Pendapatan Daerah	Laporan Keuangan, Laporan Aset	2 Laporan	22.121.000	
2				Pilihan									
2	25			Kelautan dan Perikanan									
2	25	17		Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut									
2	25	17	1	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	SKPD	Persentase kasus illegal fishing yang ditindaklanjuti sampai proses P21	100 Persen	80.000.000	Pendapatan Daerah		100 Persen	85.000.000	

PENDAHULUAN

2	25	20		Program Pengembangan Budidaya Perikanan								
2	25	20		Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul	SKPD	Jumlah jenis ikan yang diregenerasi	2 Jenis	50.000.000	Pendapatan Daerah	Nila, Patin	1 Jenis	50.000.000
2	25	20	1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	SKPD	-Jumlah kelompok UPR yang dibina sehingga meningkat produksi benihnya -Jumlah produksi benih ikan unggul yang tersedia untuk masyarakat -Jumlah petugas teknis perbenihan yang meningkat kemampuannya	3 Kelompok 330.940 ekor 6 Orang	440.000.000	Pendapatan Daerah		3 Kelompok 346.600 ekor 6 Orang	484.000.000

PENDAHULUAN

2	25	20	2	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	SKPD	-Jumlah peserta temu usaha yang mampu meningkatkan usaha budidaya -Jumlah peserta sosialisasi pembudidaya ikan yang memahami Cara Budidaya Ikan Yang Baik	20 Orang 60 Orang	81.076.000	Pendapatan Daerah		20 Orang 60 Orang	85.200.000
2	25	20	5	Revitalisasi Perikanan Budidaya Di Kawasan Budidaya Air Tawar	SKPD	-Jumlah kelompok perikanan budidaya penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria -Jumlah kelompok budidaya penerima sarpras yang dimonitoring pemanfaatannya	5 Kelompok 10 Kelompok	269.100.000	Pendapatan Daerah		5 Kelompok 10 Kelompok	282.500.000
2	25	20	13	Peningkatan Produksi Perbenihan Ikan	SKPD	Jumlah jenis pakan yang disediakan	5 jenis	300.000.000	Pendapatan Daerah		5 jenis	350.000.000

PENDAHULUAN

2	25	21		Program Pengembangan Perikanan Tangkap								
2	25	21	1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	SKPD	Jumlah nelayan tangkap yang dibina dan berkembang usahanya	180 Orang	205.000.000	Pendapatan Daerah		180 Orang	210.000.000
2	25	21	7	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	SKPD	-Jumlah kelompok penangkapan penerima sarpras yang dimonitoring pemanfaatannya -Jumlah kelompok perikanan penangkapan penerima sarana dan prasarana sesuai kriteria	3 Kelompok 3 Kelompok	136.000.000	Pendapatan Daerah		3 Kelompok 3 Kelompok	141.000.000
2	25	23		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan								
2	25	23		Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan Perikanan	SKPD	Jumlah kelompok unggulan	3 Kelompok	85.000.000	Pendapatan Daerah		3 Kelompok	90.000.000

PENDAHULUAN

2	25	23	2	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	SKPD	Jumlah peserta pelatihan yang mampu melakukan diversifikasi olahan	60 Orang	115.000.000	Pendapatan Daerah		60 Orang	125.000.000
4												
4	9			Pangan								
4	9	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)								
4	9	15	3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	SKPD	Jumlah rumah tangga yang dipantau pola konsumsinya	270 Rumah Tangga	46.948.000	Pendapatan Daerah		270 Rumah Tangga	51.642.800
4	9	15	5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	SKPD	-Jumlah daerah tahan pangan -Jumlah dokumen analisis ketersediaan pangan masyarakat	17 Kecamatan 1 Dokumen	53.845.000	Pendapatan Daerah		17 Kecamatan 1 Dokumen	59.229.500

PENDAHULUAN

4	9	15	9	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	SKPD	Jumlah kelompok wanita kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang dibina	5 Kelompok	84.440.400	Pendapatan Daerah		5 Kelompok	92.884.450
4	9	15	11	Pemantauan Dan Analisis Harga Pangan Pokok	SKPD	-Jumlah produsen yang dipantau terkait dengan harga gabah -Jumlah pasar yang dipantau terkait harga pangan	13 Penggilingan 7 Pasar	36.013.450	Pendapatan Daerah		13 Penggilingan 8 Pasar	39.614.795
4	9	15	13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	SKPD	Jumlah pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten	11 Ton	181.962.000	Pendapatan Daerah	Target sampai tahun dengan 2022 100 Ton	16 Ton	200.158.200
4	9	15	14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	SKPD	Jumlah desa mandiri pangan	23 desa	22.000.000	Pendapatan Daerah		23 desa	24.200.000

PENDAHULUAN

4	9	15	18	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	SKPD	Jumlah lumbung pangan masyarakat dengan stock gabah diatas 3 ton	8 Lumbung	16.500.000	Pendapatan Daerah		8 Lumbung	18.150.000
4	9	15	22	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	SKPD	Jumlah komoditas pangan yang diuji keamanannya	10 Komoditas	30.855.000	Pendapatan Daerah		12 Komoditas	33.940.500
4	9	15	32	Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta Menu Pangan Tk. Kabupaten dan Provinsi	SKPD	Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba (TP, PKK)	17 Kecamatan	92.125.400	Pendapatan Daerah		17 Kecamatan	99.838.000
						TOTAL		4.369.673.525				4.041.628.520